

MUDRA

JURNAL SENI BUDAYA
VOLUME 24 NO. 2 SEPTEMBER 2009



INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
2009

DEWAN PENYUNTING

Jurnal Seni Budaya MUDRA

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
Nomor: 108/DIKTI/Kep/2007. tentang Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2007 Jurnal Seni Budaya MUDRA
diakui sebagai jurnal terakreditasi, dengan peringkat B.

Ketua Penyunting
I Wayan Rai S.

Wakil Ketua Penyunting
Rinto Widyarto

Penyunting Pelaksana
I Ketut Murdana
I Wayan Setem
I Gusti Ngurah Seramasara
Diah Kustiyanti
Ni Made Ruastiti
Ni Luh Sustiawati

Penyunting Ahli
I Wayan Rai S. (ISI Denpasar) *Ethnomusicologist*
Margaret J. Kartomi. (Monash University) *Ethnomusicologist*
Jean Couteau. (Sarbone Francis) *Sociologist of Art*
Ron Jenkins. (Wesleyan University) *Theatre*
Michael Tenzer. (UMBC) *Ethnomusicologist*

ISSN 0854-3461

Alamat Penyunting dan Tata Usaha:

UPT. Penerbitan ISI Denpasar Jalan Nusa Indah Denpasar 80235
Telepon (0361) 227316, Fax. (0361) 236100 E-Mail: isidenpasar@yahoo.ac.id.

MUDRA diterbitkan oleh UPT. Penerbitan Institut Seni Indonesia Denpasar. Terbit pertama kali pada tahun 1990.

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Persyaratan seperti yang tercantum pada halaman belakang (Petunjuk Untuk Penulis). Naskah yang masuk dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format, istilah dan tata cara lainnya

Dicetak di Percetakan PT. Percetakan Bali

Mengutip ringkasan dan pernyataan atau mencetak ulang gambar atau label dari jurnal ini harus mendapat izin langsung dari penulis. Produksi ulang dalam bentuk kumpulan cetakan ulang atau untuk kepentingan periklanan atau promosi atau publikasi ulang dalam bentuk apa pun harus seizin salah satu penulis dan mendapat lisensi dari penerbit. Jurnal ini diedarkan sebagai tukaran untuk perguruan tinggi, lembaga penelitian dan perpustakaan di dalam dan luar negeri. Hanya iklan menyangkut sains dan produk yang berhubungan dengannya yang dapat dimuat pada jurnal ini.

Permission to quote excerpts and statements or reprint any figures or tables in this journal should be obtained directly from the authors. Reproduction in a reprint collection or for advertising or promotional purposes or republication in any form requires permission of one of the authors and a licence from the publisher. This journal is distributed for national and regional higher institution, institutional research and libraries. Only advertisements of scientific or related products will be allowed space in this journal.

***SUBAMANGGALA* DALAM UPACARA PERKAWINAN ADAT SURAKARTA: REFLEKSI SOSOK PEMIMPIN MELALUI PERSPEKTIF BUDAYA**

Dwiyasmono

Jurusan Seni Tari, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Surakarta, Indonesia

Abstrak

Dalam rangkaian upacara perkawinan adat Jawa yang ada saat ini, terdapat prosesi kirab pengantin, yaitu kirab *kanarendran* dan kirab *kesatriyan*. Pada prosesi ini, *subamanggala* akan berperan sebagai pemimpin barisan (termasuk pengantin, putri domas, satria kembar dan keluarga) menuju ke arena (pelaminan) dan keluar untuk berganti busana pada kirab berikutnya. *Subamanggala* biasanya menggunakan teknik *joged* Jawi tradisi gaya Kasunanan Surakarta berupa gerak dasar, yaitu pola gerak berjalan *alusan* atau *lumaksana* yaitu *lumaksana dhadhap anuraga*, *dhadhap impuran*, *lumaksana nayung*, *bambangan* dan *lumaksana oklak*, dengan kombinasi *ulap-ulap* atau *tawing*. *Alusan* sendiri adalah kualitas tari yang menghadirkan peran putra dengan karakter halus (*alusan*) *luruh* dan *alusan lanyap*, serta disajikan oleh penari putra. Dalam kualitas tari *alusan*, selain memiliki karakter *luruh* dan *lanyap* secara tradisi juga mempunyai kualitas gerak yang disebut *irama ngganggeng kanyut* (irama gerak seperti pergerakan rumput ganggang di laut yang selalu tertinggal oleh irama aliran air yang sedang mengalir). Seluruh kualitas sikap, peran, laku dan fungsi *subamanggala* semacam ini yang bisa ditunjuk sebagai nilai-nilai positif yang reflektif bagi para pemimpin bangsa Indonesia.

***Subamanggala* in Wedding Ceremonial Rites from Surakarta: a Reflection on Leadership from a Cultural Perspective**

Abstract

In a procession of Javanese tradition wedding ceremony nowadays, there is a procession which is called *kirab pengantin* (a ritual procession moving in a circle), namely *kirab kanarendran* and *kirab kesatriyan*. In this procession, *subamanggala* will act as the leader of the procession (including the bride and the bridegroom, *putri domas*, *satria kembar* and the family) that moves towards the stage (*pelaminan*) and leave the room for changing their clothes for the next *kirab*. *Subamanggala* usually uses the technique of *joged* Jawi the traditional style of Kasunanan Surakarta in the form basic movement, that is to say the pattern of walking movement *alusan* or *lumaksana*, namely *lumaksana dhadhap anuraga*, *dhadhap impuran*, *lumaksana nayung*, *bambangan* dan *lumaksana oklak*, with the combination of *ulap-ulap* or *tawing*. *Alusan* itself is the dance quality that presents male character with soft (*alusan*), *luruh* and *alusan lanyap* characters, and presented by male dancers. In the quality of dance *alusan*, besides having *luruh* character and *lanyap*, traditionally it also has movement quality which is called *irama ngganggeng kanyut* (a rhythm of movement like the movement of seaweed in the sea that is always left by the rhythm of the stream). The entire such a quality of attitude, character, behavior, and function of *subamanggala* that can be assigned as the positive values which is reflective for all leaders of Indonesia.

Keywords: Subamanggala, kirab, and upacara perkawinan.

Kebudayaan bukan semata-mata warisan (*heritage*) yang sah milik suatu masyarakat, karena kebudayaan adalah seni hidup itu sendiri (*art of living*) yang mengatur kelangsungan hidup, yang menghasilkan pilar-pilar untuk menjaga tatanan sosial. Hanya dalam arti itu tradisi dan adat istiadat menjadi nilai yang pantas dipertahankan.

Otoritarianisme yang berlangsung sekarang bukanlah warisan suatu kultur atau buah suatu kepribadian bangsa, tapi akibat dari suatu pranata yang bekerja di luar kontrol. Hal itu berlangsung belasan malah puluhan tahun yang merupakan fakta politik yang bisa disaksikan dengan mata telanjang. Akan tetapi, terkikisnya kesadaran itu menunjukkan adanya suatu cacat yang sungguh-sungguh dan penyimpangan dari suatu kultur yang perlu dipersoalkan di dalam kultur suatu bangsa. Birokratisasi yang cenderung menyeragamkan derap kehidupan masyarakat bisa diindikasikan sebagai suatu kecenderungan untuk mengubah kebudayaan bukan ke arah emansipasi suatu bangsa, tapi ke arah pembekuan daya cipta suatu bangsa yang sedang berada di dalam masa perubahan besar-besaran secara sosial dan ekonomis. Dalam kondisi semacam inilah diperlukan sebuah sikap hidup seorang pemimpin yang hendaklah bersifat *satria* dan *pandhita* (Herusatoto, 1987: 36). Seorang pemimpin yang *nyatria* – *pinandhita* tidak akan menggantungkan hidupnya kepada *semat*, *derajat*, *kramat*, dan *hormat*. Walaupun *semat* atau harta itu merupakan sarana untuk hidup, tetapi bukanlah merupakan tujuan untuk semata dicari. Tujuan seorang pemimpin adalah *rame ing gawe*, *sepi ing pamrih*, *sugih tanpa banda* atau giat bekerja, jauh dari keserakahan dan selalu merasa kaya akan kebijakan dan selalu bisa memberi siapa saja yang minta pertolongan kepadanya. Hal ini terwujud dalam sikap *subamanggala* dalam upacara perkawinan. Upacara perkawinan adalah salah satu bagian dari ritus lingkaran hidup yang dianggap penting bagi masyarakat di seluruh dunia. Terutama di masyarakat Jawa, upacara itu disadari sebagai kewajiban penting bagi setiap orang tua untuk menyelenggarakannya, ketika anak mereka menginjak dewasa dan siap untuk menikah. Bagi masyarakat Jawa, menyelenggarakan upacara perkawinan merupakan tanggung jawab orang tua yang disebut dengan istilah *netepi dharmaning asepuh* sebagai adat/tradisi turun temurun.

Adat dipandang memiliki fungsi rangkap. Di satu pihak sebagai tata tertib Illahi, di lain pihak sebagai hidup atau perbuatan yang sesuai dengan tata tertib itu. Semua anggota masyarakat harus hidup dan berbuat sesuai dengan tempatnya. Hidup dan perbuatan yang dijiwai adat mampu memelihara keselarasan dan harmoni. Adat mengatur seluruh kehidupan, maka penyelenggaraan perkawinan di samping sebagai tanggung jawab orang tua juga dimaksudkan untuk menjaga keselarasan sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini *subamanggala* berperan menjadi pemimpin laku perjalanan menuju dunia baru, fase hidup yang terbuka melalui perkawinan. Perannya mewakili kedudukan orang tua yang penuh kedewasaan dan tanggung jawab mempersiapkan masa depan yang lebih baik bagi anak, sekaligus peran penjagaan yang lengkap dalam setiap fase kehidupan anak mereka.

Pemahaman semacam ini menjadi penting bagi seorang pemimpin bangsa, karena kehidupan sosial politik bangsa juga tak ubahnya seperti sebuah “perkawinan” dimana para elit politik dalam golongan partainya melancarkan langkah-langkah koalisi dalam mencapai kekuasaan dalam pesta politik beberapa waktu lalu.

Bagi seorang pemimpin, walaupun *derajat* atau tahta/pangkat dan *kramat* atau kekuasaan merupakan sarana dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin, tetapi baginya *derajat* dan *kramat* hanyalah merupakan penghargaan yang diterimanya dari masyarakat atas prestasinya, sehingga bukan merupakan cita-cita yang dikejanya. Sebab tanpa *derajat*/pangkat pun ia tetap akan melaksanakan tugas dan keajibannya, di manapun ia ditugaskan dalam masyarakat. Baginya *kramat*/kekuasaan adalah merupakan kewajiban yang diserahkan rakyat ke pundaknya untuk dilaksanakan, bukan untuk dipakai sebagai alat untuk menguasai rakyat. *Hormat* atau penghargaan dari masyarakat terhadap pribadinya bukanlah karena semata-mata adanya *semat*, *derajat* dan *kramat* yang melakat pada dirinya, tetapi hormat yang diterimanya adalah benar-benar tulus dan bersih dari lubuk hati, karena kepribadiannya yang juga selalu hormat kepada sesama (Herusatoto, 1987: 84).

Hal ini sesuai dengan definisi *subamanggala* sebelumnya sebagai seorang yang matang, dewasa diri dan kepribadiannya, terutama dalam kemampuan teknis *gendhing* irama yang digunakan dalam upacara perkawinan. Seperti *subamanggala*, seorang pemimpin harus tahu bagaimana memainkan simponi kabinet pemerintahannya, menyanyikan seruan bersama yang bersatu, bertindak dalam langkah yang senada, tahu kapan meninggikan intensitas politiknya (dalam menghadapi ancaman keamanan bangsa) serta bagaikan konduktor mampu melirihkan nada suasana bangsa dalam kondisi yang kondusif, aman dan terpelihara.

Hans Antlov dan Sven Cederroth dalam *Kepemimpinan Jawa* (2001) juga menegaskan bahwa supaya pemimpin berperilaku baik, dalam sejarah dikenal adanya *piwulang* atau *ethics* (etika), salah satunya terdapat dalam kitab *Astabrata*, yang diterjemahkan menjadi *Delapan Kewajiban Negarawan*. *Astabrata* berisi delapan kewajiban raja (pembesar) yang dilambangkan dalam delapan dewa dengan watak-wataknya, yaitu Indra, Yama, Surya, Chandra, Bayu, Kuwera, Baruna, dan Brama. Delapan kewajiban itu bersifat akumulatif dan berjalan secara sinergis (berlaku seluruhnya secara bersama-sama). Dalam *Asta-Brata* (delapan jalan kepemimpinan) juga disebutkan di antaranya, bahwa seorang pemimpin bagaikan *turangga*, *jarwa dhosok* dari *tetumpakaning prang para punggawa*. Kuda tunggangan perang dari para prajurit selalu memiliki sifat-sifat gagah, kuat, dan lincah. Dapat berlari cepat ataupun lambat, meloncat dan berguling menurut segala perintah penunggangnya. Dapat pula berlari kencang serta melanggar apapun juga yang jadi penghalang di depannya. Dapat berdiri dengan kaki belakangnya dan menghantam sesuatu apapun yang berada di mukanya, semuanya menurut pemegang kendalinya.

Seperti halnya *subamanggala* yang mapan dan mumpuni secara teknis gerak, sehingga trampil dan *trengginas* dalam merespon *gendhing* yang mengiringinya, begitupun seorang pemimpin berlaku terhadap barisan yang dipimpinnya. Ulah kuda tunggangan para tamtama itu dipakai sebagai lambang agar manusia selalu sadar bahwa jasmani, panca indera, dan nafsu manusia itu dapat selalu dikendalikan oleh jokinnya, yaitu oleh jiwa dan budi

manusia sendiri. Jiwa dan budi haruslah selalu dapat menguasai, mengatur, dan mengekang segala gejolak nafsu jasmaniahnya. Jika hal itu dapat dilakukan, akan tentramlah jiwa dan hidup manusia. Demikian pula sebaliknya, hidup yang liar tanpa kendali, bencanalah akibatnya.

Brata (jalan) yang lain adalah *curiga* atau keris, *jarwa dosok* dari *curi lan raga*. Batu *curi* atau batu runcing berbahaya bagi raga atau badan manusia. Tergantung dari sudut mana digunakannya, berbahaya karena mengancam jiwa dalam raga, ataukah sebaliknya untuk melindungi diri terhadap bahaya dari luar dirinya. Keris dipakai sebagai andalan para ksatria dan raja-raja dalam *olah kridaning prang*. Keris dipakai sebagai simbol dari kepandaian, keuletan, dan ketangkasan hidup manusia, dalam menghadapi segala tantangan hidup. *Subamanggala* dalam berpakaian menggunakan keris. Begitu juga peran dirinya sebagai pemimpin barisan yang dapat direfleksikan kepada para pemimpin bangsa ini. Manusia sebagai pemimpin hendaknya memiliki pikiran yang tajam dengan cara belajar, olah rasa, sehingga dapat pula menanggapi situasi dengan tepat, agar dapat pula mengambil sikap yang tepat pula serta ulet dan tangkas, sehingga dapat terhindar dari tipu daya sesamanya.

Berikutnya adalah *Pradangga*, *praptaning kendhang lan gangsa*. Seperangkat gamelan, masing-masing alat kalau dipukul akan mengeluarkan suara yang berbeda, sehingga kalau dipukul bersama tanpa aturan, tanpa *laras*, maka akan menimbulkan suara hingar bingar dan sulit dinikmati. Akan tetapi bila dipukul dengan aturan permainan yang selaras akan mengumandangkan sebuah lagu yang dapat dinikmati perasaan. Gamelan dilambangkan sebagai masyarakat, yang terdiri dari berjuta manusia, dengan peragai berbeda dan masing-masing dengan kehendaknya sendiri-sendiri. Kalau seorang *subamanggala* (baca: pemimpin) akan menuruti kehendaknya sendiri tanpa menaati peraturan dan hukum yang berlaku, maka kacaulah dunia ini. Dalam keadaan yang damai setiap orang akan berguna bagi masyarakat. Tidak seorangpun tanpa guna. Semua orang dapat menyumbangkan kecakapannya masing-masing dengan selaras dan harmoni serta bermanfaat bagi lainnya. Itulah kehidupan yang dicitrakan *tata tentrem karta raharja*.

Masyarakat Jawa masih banyak mempercayai adanya kekuatan supranatural sebagai bagian dari payung spiritual, yaitu pancaran kekuatan alam. Peran *subamanggala* yang diyakini dapat mengendalikannya, menjadi bagian penting dari upacara perkawinan. Melalui upacara yang disertai tarian, kekuatan supranatural tersebut diharapkan dapat diserap bagi yang membawa berkah, dan sebaliknya, dapat disingkirkan bagi yang membawa petaka. Dengan perannya, maka *subamanggala* akan memimpin barisan seperti masuk dalam dunia yang sakral, *wingit*, dan agung di pelaminan.

Subamanggala adalah seorang peraga (pelaku) dalam kirab yang berada pada urutan paling depan selaku pimpinan dalam kirab mempelai. Pelaku ini diperankan oleh seorang laki-laki, biasanya sudah berumah tangga, berpenampilan gagah dan bersikap bijaksana dan dapat menjadi contoh bagi mempelai yang akan memasuki bahtera rumah tangga. *Subamanggala* biasanya dipilih orang yang mengerti gending-gending Jawa yang digunakan untuk mengiringi jalannya kirab mempelai. Istilah lain *subamanggala* adalah *subamanggala* (Dwirahadjo dkk, 2006: 121).

Dalam rangkaian upacara perkawinan adat Jawa yang ada saat ini, terdapat prosesi kirab pengantin, yaitu kirab *kanarendran* dan kirab *kesatriyan*. Pada prosesi ini, *subamanggala* akan berperan sebagai pemimpin barisan (termasuk pengantin, putri domas, satria kembar dan keluarga) menuju ke arena (pelaminan) dan keluar untuk berganti busana pada kirab berikutnya.

Sesuai dengan definisinya, *subamanggala* dalam hal ini akan menyesuaikan gerak dengan iringan dalam nada suasana yang digunakan dalam acara perkawinan. Dalam setiap bagiannya, *subamanggala* akan memakai iringan *Ketawang Langengita Sri Narendra Pelog Barang* pada kirab *kanarendran*, *Ketawang Subamanggala* atau *Ketawang Ibu Pertiwi* pada kirab *kesatriyan*. Pada bagian ini, biasanya *subamanggala* akan menyesuaikan gerak dengan iringan yang digunakannya. *Subamanggala* biasanya menggunakan teknik *joged Jawi* tradisi gaya Kasunanan Surakarta berupa gerak dasar, yaitu pola gerak berjalan *alusan* atau *lumaksana* yaitu *lumaksana dhadhap anuraga*, *dhadhap impuran*,

lumaksana nayung, *bambangan* dan *lumaksana oklak*, dengan kombinasi *ulap-ulap* atau *tawing*. *Alusan* sendiri adalah kualitas tari yang menghadirkan peran putra dengan karakter halus (*alusan luruh* dan *alusan lanyap*, serta disajikan oleh penari putra. Dalam kualitas tari *alusan*, selain memiliki karakter *luruh* dan *lanyap* secara tradisi juga mempunyai kualitas gerak yang disebut *irama ngganggeng kanyut* (irama gerak seperti pergerakan rumput ganggang di laut yang selalu tertinggal oleh irama aliran air yang sedang mengalir) dengan menggunakan kualitas gerak yang *mbanyu mili* (Prihartini dkk, 2007: 94). Seluruh kualitas sikap, peran, laku dan fungsi *subamanggala* semacam ini yang bisa ditunjuk sebagai nilai-nilai positif yang reflektif bagi para pemimpin laju budaya bangsa Indonesia.

Eksistensi Figur Pemimpin

Eksistensi seorang pemimpin pemerintahan dan kepala negara seharusnya senantiasa diandaikan sebagai hulu sekaligus muara dari nasib politik negara, bahkan bangsa. Penyelenggaraan negara, dengan demikian, tidak diasumsikan sebagai mekanisme sistemik dan impersonal melainkan lebih sebagai perpanjangan kemampuan personal figur seorang pemimpin.

Dalam hal ini rakyat pernah meyakini bahwa figur ideal pemimpin adalah integrasi sempurna antara keperkasaan seorang panglima perang dan kemuliaan seorang pemimpin spiritual (agama), sebuah perpaduan positif antara kemampuan teknis dan kualitas budaya seseorang. *Subamanggala* adalah salah satu bentuk contoh reflektif yang bisa kita dapatkan dalam kebudayaan kita. Sayangnya, meski begitu dekat, kekayaan nilai-nilai budaya yang reflektif dan kontekstual dengan kondisi bangsa kita saat ini, hal tersebut sulit kita revitalisasikan dalam kehidupan nyata. Kebudayaan ataupun kesenian justru menjadi sesuatu hal yang "terasing", berjarak, dan oleh karenanya segmentatif. Kebudayaan hanya dikenal sebagai sebuah kekayaan masa lalu yang terus menerus diagungkan, akan tetapi tanpa teraplikasikan secara kontekstual dalam jaman yang terus berubah saat ini, niscaya kebudayaan hanya akan menjadi penghuni museum yang tua: teronggok, tak terurus dan fana.

Merunut Sutrisno (1991: 79) oleh karenanya diperlukan pemahaman mengenai kebudayaan yang sehat sebagai *sanctuary*, jagad tempat orang-orangnya bisa secara kreatif mengartikan hidup dan memberi nilai kepadanya. Ini berarti, pertama-tama, kebudayaan yang mesti menjadi tempat mekarnya anak-anak Indonesia dalam kemerdekaannya sebagai *society*.

Konsekuensinya, politik dengan strukturnya, termasuk birokrasi, harus ditempatkan sebagai sarana bagi perkembangan kemerdekaan jiwa dan kreativitas warga-warga masyarakat, sebab politik hanyalah salah satu hasil kebudayaan yang dipilih oleh *society* dalam menentukan konsensus bersama rekan-rekan sewarga untuk tujuan kesejahteraan bersama dalam sebuah *state*. Dengan kata lain, budaya demokratislah yang harus menjadi acuannya dengan konstitusionalisme yang menentukan jelas dilindunginya hak warga negara dan kewajiban negara dalam melayani masyarakat.

Berikutnya kebudayaan harus dimengerti sebagai proses dinamika pemanusiawian, peradaban warga-warga masyarakatnya dengan pemanusiawian *state*, pula dalam hubungan kekuasaan. Artinya kekuasaan diatur dan dijalankan lewat kultur hukum yang adil yang menjamin kemerdekaan warga-warganya. Dalam hal ini, peran pemimpin yang ideal menjadi penting dan teraplikasikan.

Akhirnya dinamika budaya yang sehat? Ukurannya paling penting harus dilihat dari “buah” atau hasilnya. Seperti pendidikan yang baik, tidak dari gurunya yang baik, tetapi murid-muridnya, apakah tetap bodoh atau tidak? Demikian pun kebudayaan yang sehat, harus diukur dari apakah ia menjadikan warga-warganya orang-orang merdeka jiwa, kreatif, rasional, ataukah ia memecah-mecahnya menjadi atom atau robot dalam setiap aspek kehidupannya.

Dalam kepemimpinan Pancasila kemudian dikenal, Mulder dalam Antlov & Cederroth (2001: 84) harus *ing ngarsa sung tuladha*, memberi contoh sehingga orang akan mengikuti atas dasar keyakinan, *ing madya mangun karsa*, mendorong kemauan dan kreativitas mereka sendiri, sementara *tut wuri handayani*, membantu perkembangan inisiatif dan tanggung jawab. Dengan demikian seorang pemimpin harus memiliki kualitas sebagai penunjuk

jalan, pengasuh, yang mendorong, memimpin dan membimbing mereka yang harus dididik. Seorang pemimpin karena itu sama dengan seorang *subamanggala*.

Subamanggala dalam Pembangunan Bangsa

Pada kesempatan inilah peran *subamanggala* dalam upacara adat perkawinan Jawa –meminjam wacana antropologis– tidak hanya memperhatikan “ritual” dan “seni tradisional”, tetapi juga kehidupan sehari-hari sebagai pajangan budaya yang eksotis. Wacana tersebut mengarahkan “budaya” dan keragaman yang penuh makna agar masuk ke dalam ruang wacana bangsa yang plural. Senada dengan pendapat Braudy (1998: 613), *subamanggala* menandai upaya melestarikan “budaya” dengan membuatnya menjadi persoalan refleksi dan pilihan sadar, dengan cara mengubah cara mengada di dunia (*way of being in the world*) yang secara umum tidak reflektif, menjadi bentuk identitas yang lugas dan koheren. Jika modernitas seolah-olah mengancam akan menghapus budaya, jawabannya adalah komitmen yang diperbarui dan tegas kepada budaya atau setidaknya pada tanda-tandanya yang jelas, stabil, dan dapat dikonsumsi.

Sementara itu, Pemberton (1994: 107) telah melacak akar sejarah wacana budaya Jawa di masa kolonial dan Indonesia masa Orde Baru. Penelitiannya membuktikan bahwa sebagian besar representasi keragaman budaya dalam upacara perkawinan adat Jawa melalui *subamanggala*, pada akhirnya menjabarkan pola-pola yang telah ada untuk mengekang dan mendepolitisasi perbedaan, sembari membentuk budaya sebagai situs otoritas. Kesadaran ini, menurutnya bisa menggambarkan tentang kepemilikan cerita budaya sebagai alat yang menjamin penonton bisa “memasuki” bangsa.

Sementara ini, tuntutan untuk menjadikan budaya sebagai dasar identitas seperti bertabrakan dengan perintah kembar Indonesia yaitu pembangunan (fisik) dan pembentukan bangsa (*nation building*). Menurut Strassler, budaya menjadi semacam sekumpulan seni tradisi, upacara, dan cerita masa lalu. Karena bercampur dengan tradisi, budaya mengeras dan terbatas, terikat dengan masa lalu, untuk selanjutnya hadir di masa kini sebagai kenangan otoritatif, yang sesungguhnya dapat meredakan

ekses-ekses modernitas. Saat budaya terwadahi, ia sekaligus menjadi wadah, menjadi tempat segala macam perbedaan dituangkan. Hal tersebut menyisakan medan praktik-praktik “modern” kewargaan (*citizenship*) nasional dan pembangunan ekonomi yang tak terlanggar oleh (perbedaan) “budaya”, sebab kebudayaan berurusan dengan hal lain. Dengan demikian, justru perbedaan antara cara kerja kebudayaan dan praktik modern itulah yang dapat membuat budaya dapat menjadi lawan-pasangan (*counter-point*) modernitas, semacam rem spiritual bagi dorongan material modernitas.

Gambaran ini yang bisa diambil dari upacara perkawinan, sebuah contoh budaya bangsa dalam konteks keluarga (baca: negara dalam bentuk terkecil) dan meluas ke dalam masyarakat secara menyeluruh. Agar orang maju dalam kehidupannya, seseorang memerlukan patron, pelindung di lingkungannya. Patron demikian inilah sosok pemimpin ideal, yang harus banyak akal serta mampu menarik dan melindungi pengikut. Semuanya berbagi dalam kepentingan bersama.

Persoalan yang lebih besar terungkap di dalamnya adalah mampu tidaknya kedewasaan diri kita sebagai penonton untuk “membaca” sekian simbol (teknis maupun seni) yang ada di sekitar kita, berkaca terhadapnya dan menyadari bahwa ada sesuatu dalam hidup kita yang tak lengkap, hidup sebagai sebuah *nasion* yang penuh gejolak amarah dan prasangka selama sekian lama. Tubuh tidak hanya membutuhkan kelengkapan fasilitas fisik untuknya (yang telah bisa didapatkan dari hasil pembangunan fisik oleh pemerintah selama ini), akan tetapi juga sebuah makanan jiwa. Makanan jiwa itu bernama seni, yang berlimpah, kaya ragam dan diakui dunia, tapi toh kita membiarkannya merana tak diperhatikan.

Kesadaran “membaca” peran *subamanggala* dalam upacara perkawinan adat Jawa seperti telah dibahas sebelumnya, diperlukan untuk menghadapi apa yang disebut Danusiri sebagai multikulturalisme mitis, yaitu suatu praktik politik budaya yang mereproduksi dan bahkan mengeksploitasi stereotip dan perbedaan karakteristik suatu kelompok sosial budaya tertentu, untuk keuntungan kelompok kepentingan tertentu. Praktik politik tersebut berusaha menentukan

stereotip dan perbedaan suatu kelompok dan dijadikan sebagai mitos atau cerita sakral yang telah tercipta sejak dulu dan tidak bisa ditafsir ulang. Multikulturalisme mitis itu sendiri pun dapat melahirkan tuntutan kemerdekaan, karena ia membenarkan mitos bahwa “kita” berbeda dengan “mereka”. Padahal kemerdekaan itu sendiri bukanlah suatu persoalan hukum, tetapi lebih berupa kemerdekaan manusia menjadi makhluk sosial budaya.

Oleh sebab itu dalam konteks multikulturalisme, peran kesenian adalah memberi ruang bagi publik untuk menafsir dan menafsir ulang secara kritis, mencipta dan mencipta ulang berbagai pengertian mengenai perbedaan identitas dan budaya yang ada di Indonesia, terutama hubungan antara budaya mayoritas dan budaya minoritas. Inilah dasar pemikiran multikulturalisme kritis yang tidak mengeksploitasi makna kebudayaan, tapi mengeksplorasinya di masyarakat, sehingga menjadi relevan dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Kesenian dalam rangka multikulturalisme kritis adalah seni yang melampaui batas-batas dan menawar keragaman.

Multikulturalisme mitis (yang berusaha membangun keseragaman palsu, seperti mengulang kebijaksanaan Orde Baru) adalah semangat yang marak di Indonesia sekarang. Seolah-olah semua orang bisa mengutarakan gagasannya, dapat mengungkap banyak hal, serta setiap orang dapat membicarakan identitas dan perbedaan budaya mereka, tetapi sebenarnya hal-hal tersebut masih saja bermain dalam logika Orde Baru. Suatu logika yang mereproduksi dan melegitimasi stereotip, yang tidak membebaskan manusia, tetapi hanya mengubah wajah eksploitasi kelompok dominan terhadap kelompok minoritas menjadi bentuk lain. Suatu logika yang mengeksploitasi keragaman orang Indonesia, bukan mengeksplorasinya demi kesejahteraan bersama.

Oleh karenanya upaya pengembangan kebudayaan perlu diarahkan melalui kebijakan di antaranya mengembangkan budaya kritis masyarakat secara konstruktif, sehingga dapat menumbuhkan kontrol sosial yang produktif, mempercepat sosialisasi dan kulturisasi etika kehidupan berbangsa serta mengembangkan dan memperkuat jati diri bangsa, pengelolaan keragaman budaya dan pengembangan berbagai wujud ikatan kebangsaan.

Maka satu hal yang masih perlu diperjuangkan dalam berkesenian adalah menjaga komitmen agar kesenian terus-menerus memperjuangkan universalitas nilai, tidak membabi buta dikendalikan pasar, yang berdampak pada keringnya tontonan (baca: kesenian) sebagai sebuah tuntunan.

Oleh karenanya upaya pengembangan kebudayaan perlu diarahkan melalui kebijakan di antaranya mengembangkan budaya kritis masyarakat secara konstruktif, sehingga dapat menumbuhkan kontrol sosial yang produktif; mempercepat sosialisasi dan kulturisasi etika kehidupan berbangsa, serta mengembangkan dan memperkuat jati diri bangsa, pengelolaan keragaman budaya, dan pengembangan berbagai wujud ikatan kebangsaan.

SIMPULAN

Melalui konteks teks dan konteksnya, *subamanggala* dalam upacara adat Jawa Tengah berperan sebagai penyampai pesan estetis dan juga sekaligus representasi nilai kehidupan masyarakat. Di dalamnya tersimbolkan berbagai konsep nilai yang tercermin dalam laku gerakannya, pilihan sikap dan seluruh ornamen artistiknya dalam ritual upacara perkawinan. Melalui pemahaman yang lebih mendalam mengenai arti dan perannya dalam kebudayaan, niscaya akan dapat kita temukan idealisasi konsep kepemimpinan dimana kita dapat berefleksi kepadanya. Bukan semata sebagai sebuah ekspresi estetis ataupun juga bagian dari kuantitas seni budaya bangsa, *subamanggala* pada akhirnya mampu dihadirkan sebagai sebuah alternatif logika dalam pembangunan budaya bangsa.

Di sisi lain, semakin kita pula menyadari bahwa media pembelajaran baik di media kritik bagi perilaku-perilaku masyarakat yang menyimpang, karena kesenian tidak hanya menjadi cermin masyarakat, melainkan cermin dari keinginan-keinginan masyarakat. Di sini sebenarnya terdapat sebuah mekanisme resistensi, dan resistensi tersebut bukanlah sebuah gerakan yang bersifat politikal semata tetapi lebih bersifat kultural. Inilah sebuah usaha *cultural engineering* oleh seorang seniman mengenai sebuah "utopia" tentang sebuah "kebudayaan Indonesia" (*Indonesian culture*).

DAFTAR RUJUKAN

- Antlov, Hans dan Sven Cederroth (Ed.). (2001), *Kepemimpinan Jawa*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Braudy, Leo. (1998), *From the World in a Frame*, Macmillan, London.
- Dwiraharjo, Maryono dkk. (2006), *Kamus Istilah Perkawinan Adat Jawa Gaya Surakarta*, Jurusan Sastra Daerah Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS, Surakarta.
- Herusatoto, Budiono. (1991), *Simbolisme dalam Budaya Jawa*, Hanindita, Yogyakarta.
- Pemberton, John. (1994), *On the Subject of "Java"*, Cornell University Press, Ithaca.
- Prihartini, Nanik Sri. dkk., (2007), *Joged Tradisi Gaya Kasunanan Surakarta*, ISI Press, Surakarta.
- Koentjaraningrat. (1985), *Kebudayaan Jawa*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sutrisno, Mudji. (1991), "Harga Sebuah Kemerdekaan" dalam *Suara Karya*, Rabu 30 Oktober 1991.
- Soedarsono, RM. (1985), "Peranan Seni Budaya dalam Sejarah Kehidupan Manusia, Kontinuitas dan Perubahannya", dalam Pidato *Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Sastra UGM Yogyakarta*, Universitas Gajah Mada: Yogyakarta.
- Wahid, Abdurrahman. (1991), "Negara dan Kebudayaan" dalam *Jawa Pos*, 29 Oktober 1991.